

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara berkembang yang memiliki berbagai kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup tinggi kuantitasnya. Indonesia sebagai Negara ke empat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Hal tersebut seharusnya dapat memberikan pengaruh besar dan menjadikan salah satu potensi bagi pembangunan dan perekonomian di Indonesia apabila sumber daya alam dan sumber daya manusianya dapat dikelola dengan baik dan seimbang (Kurniawan, 2017).

Sedangkan pada pertengahan tahun 1997-1998 Indonesia termasuk salah satu Negara yang terkena dampak krisis ekonomi global yang membuat masyarakat benar-benar merasakan guncangan krisis financial dengan memburuknya kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga membuat jumlah tenaga kerja juga menurun yang akhirnya mengakibatkan jumlah pengangguran yang semakin meningkat.

Besarnya angka pengangguran merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Semakin meningkatnya jumlah penduduk ditambah dengan jumlah angkatan kerja yang

meningkat akan dapat meningkatkan pula jumlah pengangguran apabila tidak diimbangi dengan berbagai kesempatan kerja.

Menurut (Mankiw, 2006) pengangguran terjadi karena beberapa alasan diantaranya : *Pertama Waktu*, Waktu yang dibutuhkan pekerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan keterampilan yang mereka miliki. *Kedua Tingkat Upah*, upah merupakan besaran jumlah uang yang diterima oleh satu unit tenaga kerja sesuai kompensasi yang telah ditentukan. Penetapan tingkat upah yang dilakukan oleh pemerintah pada wilayah tertentu akan berpengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. *Ketiga Tingkat Pertumbuhan PDRB*, Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator kinerja yang merupakan gambaran dari hasil pembangunan yang dicapai, khususnya dalam sektor perekonomian.

Pertumbuhan yang terjadi khususnya di Pulau Jawa pada jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja ternyata tidak sebanding dengan tingginya kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini dikarenakan banyak tenaga kerja yang bermigrasi ke pulau jawa, dengan alasan Pulau Jawa merupakan salah satu tempat terbaik yang menyediakan berbagai aktivitas negeri mulai dari perdagangan, pemerintahan, urbanisasi, maupun ekonomi pusatnya. Hal ini membuat penyebaran tenaga kerja di Indonesia tidak merata dengan jumlah angkatan kerja terbanyak berada di Pulau Jawa.

Dengan demikian, banyak jumlah angkatan kerja yang sebenarnya mempunyai kualitas tetapi hanya menjadi pengangguran dengan alasan persaingan yang ketat dan minimnya jumlah lowongan kerja yang tersedia.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran**  
**di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017 (dalam jiwa)**

TAHUN	ANGKATAN KERJA	BEKERJA	PENGANGGURAN
2010	16.856.330	15.809.447	1.046.883
2011	17.026.107	15.822.765	1.203.342
2012	17.513.488	16.531.395	982.093
2013	17.524.022	16.469.960	1.054.062
2014	17.547.026	16.550.682	996.344
2015	17.298.925	16.435.142	863.783
2016	17.312.466	16.511.136	801.330
2017	18.010.612	17.186.674	823.938

*Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah angkatan kerja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun banyaknya angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah yang bekerja sehingga menimbulkan adanya pengangguran. Jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah masih mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai 2017. Pada tahun 2010 jumlah pengangguran sebanyak 1.046.883 jiwa. Kemudian pada tahun 2011 jumlah pengangguran meningkat sebanyak 156.459 jiwa, menjadi 1.203.342 jiwa. Tahun 2012 jumlah pengangguran sebesar 982.093 jiwa, tahun 2013 jumlah pengangguran kembali meningkat menjadi 1.054.062 jiwa. Tahun 2014 sejumlah 996.344 jiwa, tahun 2015 sebanyak 863.783 jiwa, tahun 2016 sebanyak 801.330 jiwa dan pada tahun 2017 jumlah pengangguran menunjukkan angka sebesar 823.938 jiwa. Dengan demikian, banyaknya angka jumlah pengangguran terbesar terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah sebanyak 1.203.342 jiwa.

Segala upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran, namun hal tersebut masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Laju peningkatan kesempatan kerja tidak sebanding dengan laju peningkatan pencari kerja. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan hal tersebut tidak dapat terserap seluruhnya di dunia kerja, sehingga menimbulkan adanya pengangguran terbuka yang jumlahnya masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Terjadinya pengangguran di suatu provinsi dapat dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan di suatu wilayah tertentu tidak dapat mencukupi jumlah angkatan kerja atau tidak seimbang antara jumlah permintaan lapangan pekerjaan akan penawaran lapangan kerja yang tersedia, sehingga hal tersebut berakibat bertambahnya jumlah pertumbuhan tenaga kerja melebihi jumlah kesempatan kerja. Apabila masalah pengangguran tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan masalah kerawanan sosial yang nantinya dapat berpotensi terjadinya kemiskinan yang semakin meningkat.

**Tabel 1.2**  
**Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 35**  
**Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017**

NO	KABUPATEN/KOTA	TPT (%)	PERINGKAT
1	Kota Tegal	8,19	1
2	Kabupaten Brebes	8,04	2
3	Kabupaten Tegal	7,33	3
4	Kota Magelang	6,68	4
5	Kota Semarang	6,61	5
6	Kabupaten Cilacap	6,30	6
7	Kabupaten Batang	5,82	7
8	Kabupaten Pemalang	5,59	8
9	Kabupaten Kebumen	5,58	9
10	Kabupaten Purbalingga	5,33	10
11	Kota Pekalongan	5,05	11
12	Kabupaten Kendal	4,93	12
13	Kabupaten Jepara	4,84	13
14	Kabupaten Banjarnegara	4,72	14
15	Kabupaten Banyumas	4,62	15
16	Kabupaten Sragen	4,55	16
17	Kabupaten Demak	4,47	17
18	Kota Surakarta	4,47	18
19	Kabupaten Pekalongan	4,39	19
20	Kabupaten Klaten	4,35	20
21	Kabupaten Wonosobo	4,18	21
22	Kota Salatiga	3,96	22
23	Kabupaten Pati	3,83	23
24	Kabupaten Boyolali	3,67	24
25	Kabupaten Purworejo	3,64	25
26	Kabupaten Kudus	3,56	26
27	Kabupaten Rembang	3,19	27
28	Kabupaten Karanganyar	3,17	28
29	Kabupaten Grobogan	3,02	29
30	Kabupaten Temanggung	2,97	30
31	Kabupaten Blora	2,85	31
32	Kabupaten Magelang	2,44	32
33	Kabupaten Wonogiri	2,38	33
34	Kota Sukoharjo	2,27	34
35	Kabupaten Semarang	1,78	35
Rata-rata		4,53628571	

Sumber : BPS Jawa Tengah dalam angka, diolah.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 10 peringkat dengan presentase tingkat pengangguran tertinggi menunjukkan bahwa tujuh diantaranya adalah wilayah Jawa Tengah bagian Barat yaitu Kota Tegal dengan tingkat pengangguran sebesar 8,19 persen menduduki peringkat pertama, peringkat kedua yaitu Kabupaten Brebes dengan tingkat pengangguran 8,04 persen dan Kabupaten Tegal sebesar 7,33 persen memasuki peringkat ketiga. Selanjutnya yaitu Kabupaten Cilacap 6,30 persen berada di peringkat ke enam, Kabupaten Batang 5,82 persen pada peringkat tujuh, Kabupaten Pemasang 5,59 persen pada peringkat delapan dan Kabupaten Purbalingga pada peringkat ke sepuluh dengan tingkat pengangguran sebesar 5,33 persen. Kemudian tiga Kabupaten/Kota bagian Barat sisanya adalah Kota Pekalongan, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Pekalongan. Dimana nilai rata-rata dari keseluruhan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,53628571 persen.

Hal tersebut tentunya membuat wilayah bagian barat Provinsi Jawa Tengah mempunyai beban tanggung jawab yang lebih besar dalam membenahi diri terkait masalah pengangguran. Dengan menjadi salah satu bagian wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Kabupaten/Kota se provinsi Jawa Tengah menunjukkan upaya yang dilakukan dalam menurunkan tingkat pengangguran yang masih belum efektif sepenuhnya. Oleh karena itu peneliti harus lebih fokus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

pengangguran terbuka di wilayah barat Provinsi Jawa Tengah sehingga kedepannya bisa lebih matang dalam menangani masalah pengangguran.

Dalam suatu wilayah, salah satu indikator yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk termasuk pengangguran adalah Upah Minimum. Adanya upah minimum akan berpengaruh pada permintaan dan penawaran tenaga kerja, penawaran tenaga kerja akan semakin meningkat sedangkan permintaan tenaga kerja akan semakin berkurang yang mengakibatkan jumlah pengangguran akan bertambah.

Penerapan sistem upah minimum, terutama bagi negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia dapat mengakibatkan pertambahan pada jumlah pengangguran. Pengangguran terbuka terjadi pada generasi muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan dan berusaha memperoleh pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu keinginan mereka adalah bekerja di sektor modern maupun di kantor agar mendapatkan upah yang cukup tinggi. Untuk hal tersebut mereka bersedia menunggu dalam waktu yang lama. Hal ini lah yang menyebabkan kecenderungan meningkatnya jumlah angka pengangguran pada suatu wilayah (Siregar, 1982).

Indikator lain yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran yaitu jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk suatu wilayah mengalami kenaikan maka jumlah angkatan kerja akan ikut naik, akibatnya kesempatan kerja akan semakin berkurang dikarenakan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Sebagian angkatan kerja yang belum atau tidak mendapatkan kesempatan

kerja akhirnya berdampak pada jumlah pengangguran yang meningkat. Disisi lain, Jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kemampuan dan usaha dapat menimbulkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru, maka nantinya banyak angkatan kerja berkesempatan lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai minat dan bakat sehingga jumlah pengangguran akan semakin berkurang.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk dan**  
**Kepadatan Penduduk di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah**  
**bagian Barat tahun 2017**

KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN PERTAHUN 2016-2017 (%)	KEPADATAN PENDUDUK TH 2017 (per km <sup>2</sup> )
Kab. Pekalongan	0,87	1.060
Kota Pekalongan	0,92	6.714
Kab. Batang	0,70	958
Kab. Pemasang	0,30	1.281
Kab. Tegal	0,30	1.630
Kota Tegal	0,40	7.193
Kab. Brebes	0,41	1.083
Kab. Cilacap	0,50	800
Kab. Purbalingga	1,00	1178
Kab. Banyumas	0,89	1254

*Sumber : BPS Jawa Tengah dalam angka*

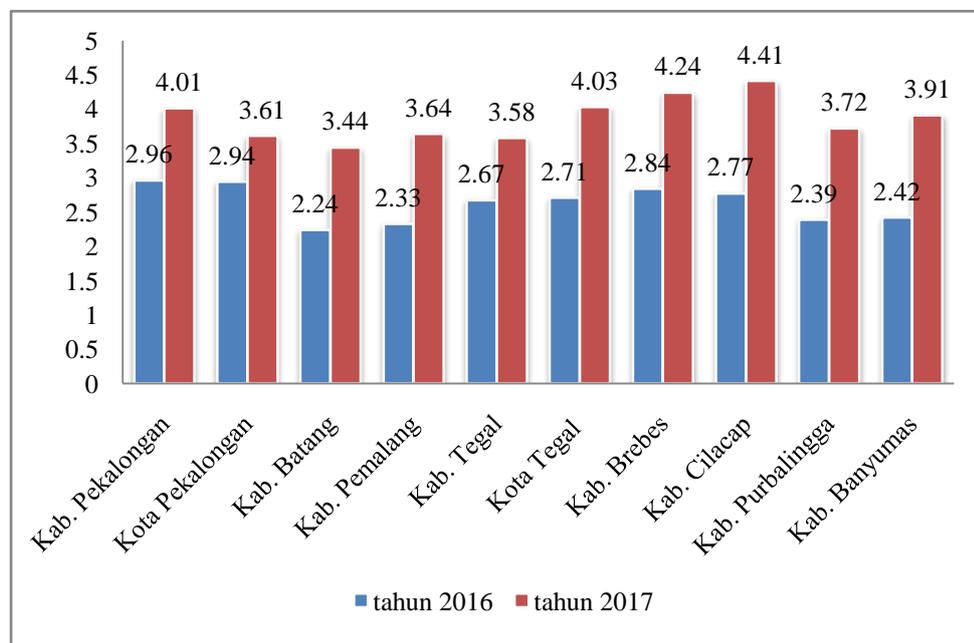
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2016-2017 di 10 Kabupaten/Kota masih mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu pada Kabupaten Purbalingga sebesar 1,00 persen, kemudian Kota Pekalongan sebesar 0,92 persen dan disusul oleh Kabupaten Banyumas dengan persentase sebesar 0,89 persen. Selanjutnya Kabupaten Pekalongan sebesar 0,87 persen, Kabupaten

Batang 0,70 persen, Kabupaten Cilacap 0,50 persen, Kabupaten Brebes 0,41 persen, Kota Tegal 0,40 persen, terakhir yaitu Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang dengan persentase laju pertumbuhan yang sama yaitu 0,30 persen pertahun 2016-2017. Adapun kondisi kepadatan penduduk pada tahun 2017 tertinggi yaitu Kota Tegal sebesar 7.193 per km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Cilacap sebesar 800 per km<sup>2</sup>. Dengan terus meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah maka nantinya akan menyebabkan persaingan angkatan kerja yang semakin meningkat.

Selain upah minimum dan jumlah penduduk, inflasi juga menjadi salah satu indikator penting dalam masalah pengangguran. Inflasi merupakan suatu proses yang menunjukkan kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian dan berlangsung secara terus menerus (*continue*). Kondisi perekonomian jika mengalami tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja. Ketika tingkat inflasi meningkat maka harga-harga barang dan jasa akan naik, dan permintaan barang dan jasa akan menurun. Turunnya permintaan akan menyebabkan menurunnya permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga berakibat pada peningkatan jumlah pengangguran terbuka (Sukirno, 2004).

Terjadinya inflasi dapat berdampak negatif maupun positif. Dampak negatif inflasi terhadap pengangguran terjadi ketika tingkat inflasi tinggi dan terjadi pada jangka waktu yang pendek, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kurva Philips yang menyatakan bahwa inflasi dan pengangguran mempunyai hubungan yang terbalik, dimana ketika laju inflasi naik maka pengangguran

akan menurun, begitupun sebaliknya. Sedangkan dampak positif inflasi terhadap pengangguran dijelaskan menurut tanggapan Milton Friedman, seorang ekonom Amerika dan intelektual publik, berlaku harga fleksibel pada saat jangka panjang, dengan kata lain bahwa tingkat pengangguran bagaimanapun juga pada tingkat alamiahnya, sehingga hubungan yang terjadi antara inflasi dan pengangguran ini menjadi positif.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

**Gambar 1.1**  
**Laju inflasi di 10 Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah bagian Barat**  
**(dalam persen)**

Berdasarkan gambar diatas, laju inflasi di setiap wilayah kabupaten/kota mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Pada tahun 2016, laju inflasi tertinggi terjadi pada Kabupaten Pekalongan sebesar 2,96 persen, kemudian Kota Pekalongan

sebesar 2,94 persen, Kabupaten Brebes sebesar 2,84 persen, Kabupaten Cilacap sebesar 2,77 persen, Kota Tegal sebesar 2,71 persen, Kabupaten Tegal sebesar 2,67 persen, Kabupaten Banyumas sebesar 2,42 persen, Kabupaten Purbalingga sebesar 2,39 persen, Kabupaten Pemalang sebesar 2,33 persen dan laju inflasi terendah yaitu Kabupaten Batang sebesar 2,24 persen. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan inflasi yang signifikan, dimana urutan dengan peringkat tertinggi yaitu Kabupaten Cilacap sebesar 4,41 persen, Kabupaten Brebes sebesar 4,24 persen, Kota Tegal sebesar 4,03 persen, Kabupaten Pekalongan sebesar 4,01 persen, Kabupaten Banyumas sebesar 3,91 persen, Kabupaten Purbalingga sebesar 3,72 persen, Kabupaten Pemalang sebesar 3,64 persen, Kota Pekalongan sebesar 3,61 persen, Kabupaten Tegal sebesar 3,58 persen dan terakhir yaitu Kabupaten Batang sebesar 3,44 persen.

Hal tersebut merupakan salah satu masalah yang cukup serius bagi Kabupaten/Kota wilayah bagian barat Provinsi Jawa Tengah karena tidak dapat menjaga kestabilan dalam sisi moneterinya. Penyebab tingginya inflasi biasanya dikarenakan beberapa faktor misalnya kenaikan harga BBM, meningkatnya harga sembako yang sudah termasuk kebutuhan pokok yang harus terpenuhi setiap harinya, maupun meningkatnya tarif listrik karena listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam proses produksi khususnya bagi beberapa perusahaan yang banyak menggunakan mesin sebagai proses produksinya.

Dengan demikian, berdasarkan sedikit pemaparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap

Pengangguran Terbuka (Studi Kasus di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Bagian Barat Periode 2012-2017)”.  
Tengah Bagian Barat Periode 2012-2017)”.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Permasalahan yang dibatasi dalam penelitian ini terkait dengan variabel penjelas seperti Upah Minimum Kabupaten/Kota, Jumlah Penduduk dan Inflasi yang dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu Jumlah Pengangguran Terbuka yang dilakukan di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah wilayah bagian Barat pada tahun 2012 sampai tahun 2017.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah bagian Barat?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah bagian Barat?
3. Seberapa besar pengaruh inflasi terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah bagian Barat?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah bagian Barat.

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah bagian Barat.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh inflasi terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah bagian Barat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai masalah pengangguran yang ada di sekitar kita yang semakin tahun semakin mengalami peningkatan jumlahnya akibat dari beberapa faktor.
2. Di harapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan meneliti hal yang berkaitan.
3. Sebagai referensi bagi para pihak terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah serta pemerintah daerah, dengan memberikan informasi mengenai pengangguran terbuka di Jawa Tengah serta faktor-faktor apa saja yang berhubungan.